

# Cita Ekonomika

JURNAL EKONOMI

**Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Tingkat Kemiskinan di Daerah Perbatasan Kabupaten Merauke**  
Fenty J. Manuhutu

**Pengembangan Model Pengukuran Disparitas Pembangunan Antar Wilayah Berbasis Multidimensi di Provinsi Maluku**  
Amaluddin

**Pengaruh Atribut Kartu AS Telkomsel Terhadap Loyalitas Pelanggan di Kota Ambon**  
Angrani Chaniago

***Financial Literacy* Berdasarkan Jenis Kelamin (Studi Empiris Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi UKIM)**  
Micrets Agustina Silaya

**Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Maluku**  
Terezia V. Pattimahu

**Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Kawasan Timur Indonesia Periode 2008 - 2014**  
Muhammad Ratmasa Serang

**Analisis Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Semangat Kerja Pegawai BAPPEDA Provinsi Maluku**  
Pieter N. R. Rehatta

**Pengaruh Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, Pajak dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku (Panel Data Analisis: Studi pada 11 Kabupaten/Kota)**  
Teddy Christianto Leasiwal

**Pengaruh Spiritualitas di Tempat Kerja, Umur, Lamanya Bekerja dan Pendapatan per bulan Terhadap Motivasi Manajemen Laba**  
Dwi Kriswantini

**Pengaruh Stres Kerja Terhadap Komitmen Organisasi yang Dimoderasi Oleh *Locus of Control* pada Rumah Sakit Swasta di Kota Ambon**  
Saleh Tutupoho

**Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan Otonomi (Studi Kasus Kabupaten Maluku Tenggara Barat)**  
Elsjamina M. Latuny

**Pengaruh Pendidikan, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI)**  
Umami Duwila

CE	Vol. X	No. 1	Halaman 1 - 109	Ambon Mei 2016	ISSN 1978-3612
----	--------	-------	--------------------	-------------------	-------------------

**PENGARUH INVESTASI PEMERINTAH, KONSUMSI PEMERINTAH, PAJAK DAN  
RETRIBUSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI MALUKU  
(Panel Data Analisis: Studi paada 11 kabupaten/kota)**

**Teddy Christianto Leasiwal**

Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura  
Jl. Ir. M. Putuhena Kampus Poka Ambon

**ABSTRAK**

Pengelolaan kebijakan fiskal melalui koordinasi yang baik akan memberikan sinyal positif bagi pasar dan menjaga stabilitas makroekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, pajak dan retribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.

Variabel dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku (Y), Investasi Pemerintah ( $X_1$ ), Konsumsi Pemerintah ( $X_2$ ), dan Pendapatan Asli Daerah ( $X_3$ ). Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data panel, dengan periode tahun 2007-2013 dan 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Investasi pemerintah yang merupakan unsur pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Konsumsi pemerintah yang merupakan unsur pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif berpengaruh sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak yang merupakan unsur penerimaan pemerintah memiliki hubungan yang positif berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku

**Kata Kunci :** *investasi, konsumsi, pajak, retribusi, pertumbuhan ekonomi.*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dunia dewasa ini ditandai dengan semakin terintegrasinya kegiatan ekonomi antar negara. Indonesia secara umum dan Provinsi Maluku secara khusus mengikuti perkembangan tersebut melalui serangkaian deregulasi keuangan dan perbankan yang dimulai sejak tahun 1983. Implikasi dari deregulasi tersebut adalah semakin meningkatnya integrasi dan interaksi antar berbagai unsur ekonomi yang menyebabkan struktur ekonomi menjadi semakin dinamis dan kompleks. Struktur ekonomi yang kompleks akan mengubah perilaku ekonomi yang diindikasikan dengan munculnya berbagai fenomena yang relatif baru bagi perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi selalu digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian sehingga barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) ini tidak terlepas dari campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Salah satu alat pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian adalah dengan

menggunakan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi jalannya atau proses kehidupan ekonomi masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang merupakan acuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

Krisis ekonomi memberi pelajaran kepada bangsa Indonesia bahwa beberapa indikator-indikator ekonomi makro yang memuaskan belum tentu menjadi jaminan bahwa kondisi ekonomi Indonesia memang kuat. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi sebelum krisis ekonomi pada akhir dekade 1990-an maka salah satu pilihannya adalah kebijakan fiskal. Pada saat ekonomi dirasakan berjalan terlalu lambat dari yang seharusnya ditandai dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat pengangguran maka kebijakan fiskal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran.

Kebijakan fiskal merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan makroekonomi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kebijakan fiskal ditetapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemudian yang menyebabkan munculnya *trade-off* antara pencapaian

stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi terutama dalam jangka pendek. Kebijakan defisit fiskal yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan tingkat inflasi, sebaliknya perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi juga memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan perekonomian yang semakin dinamis dan terintegrasi dengan perekonomian Indonesia memberikan implikasi penting bagi para pelaku ekonomi terutama dalam pengambilan kebijakan makroekonomi. Pengelolaan kebijakan fiskal melalui koordinasi yang baik akan memberikan sinyal positif bagi pasar dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Di Provinsi Maluku krisis ekonomi diawali dengan adanya krisis sosial yang berubah menjadi sebuah krisis multidimensional yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakatnya sehingga terjadi kemerosotan pertumbuhannya hingga ke titik nadir.

Di Provinsi Maluku pendapatan asli daerah masih relatif kecil sehingga untuk membiayai pengeluaran

baik yang bersifat langsung maupun tak langsung, pemerintah Provinsi Maluku masih mengandalkan dana dari pusat baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus maupun bantuan atau hibah. Hal ini untuk menunjang pengeluaran provinsi yang sangat besar terutama untuk pembangunan, meskipun demikian tingginya tingkat pengeluaran pemerintah provinsi tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang tepat sasaran agar meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.

Perkembangan pengeluaran daerah di proxy dengan nilai konsumsi dan investasi, penerimaan pemerintah yang di proxy dengan nilai pajak dan retribusi serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Maluku tahun 2007-2013 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel 1.

**Tabel 1.** Pendapatan Asli Daerah, Konsumsi Pemerintah, Investasi Pemerintah dan PDRB 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku, Tahun 2007 - 2013

KAB./KOTA	THN	PAJAK	RETRIBUSI	KONSUMSI	INVESTASI	PDRB
AMBON	2007	9,728,221,264.00	7,775,619,769.00	298,317,371,758.45	90,304,127,901.00	5,241,501.00
	2008	12,225,294,065.00	10,007,870,722.00	394,360,380,769.50	145,259,090,103.67	5,493,093.00
	2009	13,330,295,066.00	10,997,897,333.00	415,976,890,370.00	146,345,909,123.76	5,578,284.00
	2010	15,129,828,891.00	11,307,670,200.00	437,670,928,020.97	148,329,937,465.05	4,913,427.00
	2011	32,933,756,060.73	16,797,815,441.03	436,857,348,926.00	95,334,843,267.00	5,053,118.00
	2012	39,300,312,509.80	16,459,759,234.00	514,781,827,758.15	111,466,006,989.00	5,064,225.00
	2013	44,982,635,424.00	17,798,890,665.00	551,943,338,463.00	119,268,254,471.56	5,134,300.00
BURU SELATAN	2007	438,750,500.00	1,345,876,189.00	98,785,450,105.00	13,567,698,709.00	1,915,367.00
	2008	647,373,050.00	4,233,796,182.00	110,166,567,103.00	149,486,849,825.00	1,955,537.00
	2009	21,965,650.00	0.00	37,038,583,931.06	57,187,853,430.00	1,982,255.00
	2010	500,000,000.00	1,650,000,000.00	53,488,172,482.50	182,998,194,417.95	2,032,974.00
	2011	500,000,000.00	648,000,000.00	73,006,385,079.00	114,667,234,997.00	2,093,727.00
	2012	624,500,000.00	878,688,000.00	91,020,506,277.00	96,230,164,224.00	2,145,757.00
	2013	893,971,750.00	1,304,851,680.00	107,404,197,406.86	111,626,990,499.84	2,232,765.00
BURU	2007	647,373,050.00	3,916,598,125.00	88,117,297,857.50	140,894,848,873.00	1,470,820.00
	2008	647,373,050.00	4,233,796,182.00	110,166,567,103.00	149,486,849,825.00	1,520,634.00
	2009	778,285,300.00	4,516,823,624.00	106,134,645,672.55	91,452,694,788.00	1,558,095.00
	2010	1,668,300,000.00	4,922,658,000.00	144,023,535,050.00	126,160,235,320.47	1,451,576.00
	2011	998,876,543.70	2,506,879,654.00	165,437,987,879.00	65,082,899,065.00	1,492,212.00
	2012	1,208,902,808.00	4,305,681,908.00	193,669,397,139.00	82,081,787,903.00	1,499,132.00
	2013	2,897,571,861.00	5,385,666,614.05	239,771,310,951.00	35,693,485,553.00	1,501,345.00
KEP. ARU	2007	256,870,500.00	688,650,250.00	165,762,800,300.00	49,875,300,650.00	1,951,483.00
	2008	287,560,650.00	796,760,872.00	176,765,654,300.00	55,673,200,980.00	2,031,666.00
	2009	278,608,550.00	875,755,875.00	193,452,876,600.00	59,785,300,875.00	2,088,536.00
	2010	320,675,800.00	943,800,850.00	198,765,300,540.00	65,443,082,872.00	2,247,119.00
	2011	325,688,900.00	956,900,750.00	201,110,536,833.00	67,354,081,971.00	2,328,430.00
	2012	560,888,700.00	2,969,648,767.00	227,589,005,895.00	56,088,312,670.00	2,335,432.00
	2013	949,527,356.00	3,693,739,330.00	235,809,076,598.00	89,076,543,980.00	2,456,770.00
MALUKU TENGGARA	2007	2,856,350,765.00	3,750,876,876.00	146,435,677,875.76	144,120,061,217.00	1,817,979.00
	2008	2,946,230,276.00	3,840,099,845.00	151,234,682,658.99	150,635,518,509.00	1,878,518.00
	2009	1,261,661,733.45	2,088,792,842.00	120,064,280,157.00	114,426,712,563.00	1,933,879.00
	2010	1,983,028,995.36	5,711,420,427.00	162,311,841,153.21	126,549,354,708.22	2,066,998.00
	2011	5,612,914,881.00	8,470,009,380.11	181,884,591,125.00	110,407,627,020.70	2,167,739.00
	2012	2,129,997,764.21	2,309,742,337.00	202,072,867,080.00	83,718,337,453.00	2,160,453.00
	2013	4,834,395,414.00	8,352,872,655.22	221,013,847,545.00	106,119,464,505.00	2,245,802.00
MALUKU TENGAH	2007	2,543,465,472.00	2,756,534,552.00	305,432,950,455.00	211,137,800,050.00	1,333,608.00
	2008	2,531,635,461.00	2,179,464,441.00	309,464,926,434.00	215,129,923,192.42	1,387,277.00
	2009	2,550,000,000.00	3,950,528,000.00	341,277,564,900.00	207,511,301,550.00	1,411,618.00
	2010	3,959,374,757.00	3,511,685,465.00	410,480,392,429.00	132,409,262,162.55	1,539,638.00

	2011	3,486,764,580.00	3,739,160,143.49	502,036,526,300.00	129,429,942,042.33	1,623,160.00
	2012	4,568,785,000.00	3,360,052,000.00	567,688,224,025.00	109,974,573,188.00	1,625,430.00
	2013	6,478,975,000.00	3,985,425,000.00	625,799,223,026.00	195,876,464,221.00	1,675,450.00
<b>MALUKU TENGGARA BARAT</b>	2007	509,115,867.00	2,073,910,826.00	185,867,890,000.00		2,229,678.00
	2008	2,005,835,565.00	2,985,430,134.00	191,657,905,000.00	87,876,980,540.00	2,302,869.00
	2009	1,962,882,036.00	3,309,160,149.00	185,678,096,550.00	83,054,675,700.00	2,385,215.00
	2010	1,122,942,938.00	3,136,747,834.00	201,534,956,000.00	98,653,450,850.00	2,403,829.00
	2011	1,690,000,000.00	2,140,000,000.00	218,600,000,000.00	116,910,000,000.00	2,492,578.00
	2012	2,510,000,000.00	3,080,000,000.00	257,290,000,000.00	82,420,000,000.00	2,583,675.00
	2013	3,670,000,000.00	5,330,000,000.00	273,300,000,000.00	70,840,000,000.00	2,588,657.00
<b>SERAM BAGIAN TIMUR</b>	2007	557,800,000.00	116,500,000.00	53,744,821,273.00	95,358,854,300.00	1,339,328.00
	2008	2,069,172,000.00	319,274,431.00	77,362,181,902.00	137,763,705,955.00	1,382,819.00
	2009	1,205,723,264.00	541,338,870.00	74,448,804,623.00	207,965,367,361.00	1,417,257.00
	2010	1,258,659,548.00	740,010,030.00	92,744,621,513.00	109,585,043,268.00	1,345,992.00
	2011	1,792,925,754.00	660,293,700.00	119,815,697,931.00	151,429,327,432.00	1,394,397.00
	2012	2,139,509,973.00	699,830,416.00	151,507,656,725.00	138,931,965,723.00	1,395,346.00
	2013	2,922,160,834.00	1,801,533,694.00	162,579,686,452.00	165,534,954,930.00	1,401,345.00
<b>SERAM BAGIAN BARAT</b>	2007	1,068,050,000.00	1,244,000,000.00	304,904,794.38	117,442,033.52	1,565,820.00
	2008	887,504,030.00	1,329,450,305.00	156,775,875,582.00	256,765,320,075.00	1,632,456.00
	2009	60,718,305.00	1,581,428,337.00	174,664,752,581.00	274,171,535,036.00	1,676,499.00
	2010	847,882,439.00	614,228,423.00	196,765,430,111.00	385,675,320,050.00	1,738,125.00
	2011	96,356,500,163.07	144,534,750,244.61	221,963,481,598.00	470,974,223,563.00	1,819,338.00
	2012	101,048,239,343.49	151,572,359,015.24	504,225,365,026.00	214,240,630,009.00	1,887,599.00
	2013	152,055,235,456.51	173,245,665,010.00	665,256,375,025.00	298,500,624,005.00	1,965,345.00
<b>MALUKU BARAT DAYA</b>	2007	35,399,137,352.00	1,449,000,000.00	79,356,875,540.00	186,500,700,750.00	2,021,573.00
	2008	33,065,535,224.00	723,225,643.00	82,345,765,335.00	197,065,434,500.00	2,100,012.00
	2009	146,984,991.00	822,913,117.00	87,065,345,200.00	215,676,589,022.00	2,181,708.00
	2010	295,523,804.00	289,810,500.00	98,765,985,025.00	225,675,875,235.00	2,417,341.00
	2011	186,997,314.00	1,278,808,788.00	103,565,985,023.00	234,508,760,223.00	2,572,725.00
	2012	105,000,548.00	782,563,450.00	175,755,070,065.00	355,607,800,225.00	2,543,760.00
	2013	236,754,879.00	875,354,600.00	235,856,087,044.00	405,780,009,750.00	2,650,330.00
<b>TUAL</b>	2007	925,524,883.00	1,257,850,500.00	47,876,874,300.00	55,675,150,760.00	2,334,238.00
	2008	934,600,785.00	1,321,565,765.00	49,876,500,565.00	54,650,148,865.00	2,415,283.00
	2009	954,317,839.00	1,330,582,399.57	50,985,696,491.00	57,749,147,862.00	2,490,378.00
	2010	978,423,833.00	1,458,564,432.68	76,876,543,320.00	98,564,320,876.00	2,301,967.00
	2011	1,030,000,000.00	1,440,113,000.00	88,424,525,002.00	133,738,472,933.00	2,434,500.00
	2012	1,545,541,772.00	1,995,528,462.00	102,152,113,918.00	85,260,947,584.00	2,445,675.00
	2013	1,954,765,883.00	2,358,256,504.00	235,652,223,990.00	197,654,322,000.00	2,501,650.00

Sumber: BPS Provinsi Maluku

Untuk kota Ambon peningkatan pendapatan asli daerah sangat signifikan dapat dilihat pada tahun 2010 sampai tahun 2011 yaitu sebesar 46,84 % sedangkan peningkatan konsumsi dan investasi pemerintah dapat dilihat pada tahun 2007 sampai tahun 2008 yaitu sebesar 24,35 % dan 37,83 %.

Untuk kabupaten Buru Selatan peningkatan pendapatan asli daerah sangat signifikan dapat dilihat pada tahun 2009 sampai tahun 2010 yaitu sebesar 98,98 %. Di periode yang sama juga terjadi peningkatan konsumsi dan investasi pemerintah yaitu sebesar 30,75 % dan 68,75 %.

Untuk kabupaten Buru peningkatan pajak signifikan dapat dilihat pada pendapatan asli daerah dapat dilihat pada tahun 2011 sampai tahun 2012 yaitu sebesar 36,43 %. Peningkatan konsumsi dan investasi pemerintah yang signifikan terjadi pada tahun 2009 sampai tahun 2010 yaitu sebesar 26,31 % dan 27,51 %.

Untuk kabupaten Kepulauan Aru peningkatan pendapatan asli daerah terjadi pada periode tahun 2011 sampai tahun 2012 yaitu sebesar 63,67 %. Peningkatan konsumsi pemerintah terjadi pada tahun 2011 sampai tahun 2012 yaitu sebesar

11,63 %. Peningkatan investasi pemerintah terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2013 yaitu sebesar 37,03 %.

Untuk kabupaten Maluku Tenggara peningkatan pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2009 hingga tahun 2010 yaitu sebesar 56,46 %. Peningkatan konsumsi pemerintah terjadi pada tahun 2009 sampai tahun 2010 yaitu sebesar 26,03 % sedangkan investasi pemerintah terjadi pada tahun 2012 sampai tahun 2013 yaitu sebesar 21,11 %.

Untuk kabupaten Maluku Tengah peningkatan pendapatan asli daerah yang paling besar terjadi pada tahun 2008 hingga tahun 2009 sebesar 27,53 %. Peningkatan konsumsi pemerintah terjadi pada tahun 2010 hingga 2011 sebesar 18,24 % sedangkan peningkatan investasi pemerintah terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2013 yaitu sebesar 43,86 %.

Untuk kabupaten Maluku Tenggara Barat peningkatan pendapatan asli daerah yang paling besar terjadi pada tahun 2007 hingga tahun 2008 sebesar 48,25 % . Peningkatan konsumsi pemerintah terjadi pada tahun 2011 hingga tahun 2012 yaitu sebesar 15,04 % sedangkan peningkatan investasi pemerintah

sangat signifikan terjadi pada tahun 2007 hingga tahun 2008 yaitu mencapai 100 %.

Untuk kabupaten Seram Bagian Timur peningkatan pendapatan asli daerah yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2007 sampai tahun 2008 yaitu sebesar 71,77 %. Peningkatan konsumsi pemerintah terjadi pada tahun 2007 sampai tahun 2008 yaitu sebesar 30,78 % sedangkan peningkatan investasi pemerintah terjadi pada periode tahun 2008 sampai tahun 2009 yaitu sebesar 33,76 %.

Untuk kabupaten Seram Bagian Barat peningkatan pendapatan asli daerah yang sangat besar terjadi pada tahun 2010 hingga tahun 2011 yaitu sebesar 99,39 % sedangkan peningkatan konsumsi dan investasi pemerintah terjadi pada periode tahun 2007 hingga tahun 2008 yaitu sebesar 99,81 % dan 99,95 %.

Untuk kabupaten Maluku Barat Daya peningkatan pendapatan asli daerah yang paling besar terjadi pada tahun 2010 sampai tahun 2011 yaitu sebesar 60,07 %. Peningkatan konsumsi dan investasi pemerintah terjadi pada tahun 2011 hingga tahun 2012 yaitu sebesar 41,07 % dan 34,05 %.

Untuk kota Tual peningkatan pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2011 hingga tahun 2012 yaitu sebesar 30,2483 %. Peningkatan konsumsi pemerintah yang paling besar terjadi pada tahun 2012 hingga tahun 2013 yaitu sebesar 56,65 % sedangkan peningkatan investasi pemerintah terjadi pada tahun 2009 hingga tahun 2010 yaitu sebesar 66,77 %.

Peningkatan pengeluaran pemerintah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dimana pemerintah mengambil kebijakan fiskal secara ekspansif dimana sasaran kebijakan fiskal ekspansif adalah peningkatan nilai PDRB dan memperluas lapangan pekerjaan sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Kebijakan ekspansif juga berarti dimana pengeluaran pemerintah bertujuan kepada pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek padat karya yang akan mengurangi tingkat pengangguran.

Meskipun anggaran pengeluaran pemerintah terus meningkat namun pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten / kota belum menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sama padahal secara teori peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah telah menunjukkan adanya ekspansi ekonomi yang bertujuan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena besarnya peranan kebijakan pemerintah di bidang fiskal baik pada kondisi sebelum krisis maupun setelah terjadinya krisis ekonomi.

Sehingga pertanyaan penelitian yang menjadi fokus untuk dijawab adalah

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah yang berupa konsumsi dan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan pemerintah yang berupa pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena jumlah penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bisa diperoleh melalui peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun. Dengan demikian dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional (Tambunan, 2001a).

Pertumbuhan ekonomi bisa dilihat dalam nilai absolut dan nilai relatif (persentase). Pertumbuhan ekonomi dalam nilai absolut selanjutnya dapat dinyatakan dalam nilai nominal berdasarkan harga berlaku dan nilai riil (nyata) berdasarkan harga konstan (Tambunan, 2001b).

Brata dan Arifin (2003) juga telah mencoba menganalisis aspek fiskal pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi di Indonesia. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah tahun 1999, pemerintah daerah baik tingkat Provinsi (Dati I) maupun Kabupaten/Kota (Dati II) lebih banyak tergantung pada pemerintah pusat (Kuncoro, 1995). Dalam hal ini, andil subsidi dari pemerintah pusat dalam struktur penerimaan daerah sangat tinggi, jauh melebihi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan ekonomi hanya dapat terlaksana jika tersedia sejumlah dana. Dana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah berasal dari berbagai sumber yang disebut sebagai penerimaan daerah.

### Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Keynes

Teori pertumbuhan ekonomi menurut John Maynard Keynes (1883-1946) adalah teori pertumbuhan ekonomi yang pertama kali menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan lebih

meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era *Great Depression*.

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seseorang membelanjakan uangnya, ia akan membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian berjalan secara normal.

#### **Kebijakan Fiskal dalam Otonomi Daerah**

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Peranan pengeluaran pemerintah baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD khususnya pengeluaran untuk *human capital* dan infrastruktur fisik, dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi pada sisi lain pembiayaan dari pengeluaran pemerintah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana produktifitas pengeluaran pemerintah tersebut dan distorsi pajak yang ditimbulkannya, yang mana dalam konteks ini pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi total output (PDRB) yakni melalui penyediaan infrastruktur, barang-barang publik dan insentif pemerintah terhadap dunia usaha seperti subsidi ekspor.

Dari segi penerimaan, maka pungutan pajak oleh pemerintah akan mengurangi pendapatan para pengusaha yang sebetulnya dapat digunakan untuk konsumsi dan pembentukan modal atau akan mengurangi pendapatan konsumsi dan penerimaan akan hasil produksi.

#### **Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak dan bahkan penerimaan yang berasal dari pinjaman/bantuan dari luar negeri sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara.

Pada dasarnya kebijakan fiskal yang diterapkan selama tahun fiskal 1993-1998 tetap melanjutkan kebijakan fiskal yang dijalankan sebelumnya, yaitu suatu kebijakan fiskal yang hati-hati (*prudent*).

Implikasinya adalah pada setiap tahun anggaran harus diupayakan adanya surplus anggaran. Selain itu, kebijakan fiskal tidak boleh menjadi alat pemicu terjadinya inflasi yang tidak terkendali. Demikian pula, kebijakan fiskal yang diterapkan harus dapat berfungsi sebagai instrumen untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable*). Jadi sampai batas-batas tertentu kebijakan fiskal juga berfungsi sebagai alat stimulus ekonomi, meskipun perkembangan sektor riil dan pertumbuhan PDB yang rata-rata mencapai 7% setiap tahun, terutama diandalkan dari pertumbuhan investasi baik domestik maupun dari luar negeri.

Indonesia menganut sistem desentralisasi fiskal dimana menurut Ivar Kolstad dan Odd-Helge Fjeldstad desentralisasi fiskal adalah pemberian wewenang belanja dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada pemerintah daerah. Manfaat desentralisasi fiskal adalah untuk menyesuaikan antara kebutuhan masyarakat dengan alokasi belanja pemerintah daerah sehingga terjadi efisiensi melalui kompetisi dan peningkatan kemampuan keuangan. Kekurangannya dari desentralisasi fiskal adalah desentralisasi boleh jadi tidak efisien dari pengambilan kebijakan dan penggunaan sumber daya, jika ada eksternalitas positif dan negatif diantara daerah. Selain itu, pengalihan kebijakan fiskal ke daerah akan menambah ketidakadilan nasional dan mengabaikan peran pemerintah pusat dalam instrument pengambilan kebijakan.

Untuk mengatasi beban fiskal sangat diperlukan koordinasi pajak dan harmonisasi pajak. Koordinasi pajak disini maksudnya adalah rancang bangun terhadap otoritas penanganan pajak diantara level pemerintahan. Koordinasi ini dapat berupa koordinasi vertikal dengan pemerintah pusat dan koordinasi horizontal kepada pemerintah daerah lain. Selain untuk mengatasi beban fiskal harmonisasi pajak dilakukan dengan alasan tingginya mobilitas ekonomi di antara beberapa daerah yang memungkinkan perpindahan pekerja sebagai wajib pajak. Selain itu juga disebabkan adanya unit pembayar pajak yang memiliki badan usaha di berbagai daerah sekaligus dan memudahkan persepsi masyarakat tentang pajak terutama dalam hal administrasi dan implementasinya. Beban fiskal seringkali terjadi karena adanya perbedaan pengenaan pajak bagi satu daerah dengan daerah lain yang menyulitkan terjadinya harmonisasi pajak. Perbedaan peraturan dan sudut pandang bagi masing-masing daerah dalam pengenaan pajak sangat berpengaruh terhadap perbedaan pemasukan dan pelayanan publik di masing-masing daerah.

#### **Pengeluaran Pemerintah**

Pada dasarnya ada tiga faktor penting yang akan menentukan pengeluaran pemerintah pada suatu tahun tertentu, yaitu:

- 1) Pajak yang akan diharapkan akan diterima
- 2) Pertimbangan-pertimbangan politik
- 3) Persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), pemerintah harus mengelola pendapatan untuk membiayai barang-barang publiknya dan untuk program-program redistribusi pendapatannya. Pendapatan seperti itu berasal dari pajak-pajak yang dikenakan atas pendapatan pribadi dan pendapatan perusahaan, atas upah atau gaji pegawai, atas penjualan barang-barang konsumen, atas bumi dan bangunan dan atas hal-hal lain. Seluruh tingkatan pemerintahan mengumpulkan pajak-pajak untuk membiayai pengeluarannya.

Sementara Wijaya (2000) mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai efek pengganda (*multiple effect*) dan merangsang kenaikan pendapatan nasional yang lebih besar daripada pembayaran dalam jumlah yang sama. Pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*) karena ia menaikkan permintaan agregatif didasarkan pada anggapan bahwa pengeluaran pemerintah tidaklah pada proyek-proyek yang menghalangi atau menggantikan investasi sektor swasta.

Teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP juga dijelaskan oleh hukum Wagner, dimana dinyatakan dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat (Mangkoesebroto, 2000). Pengeluaran pemerintah merupakan komponen dari permintaan agregat dalam pasar barang, sebagaimana ditunjukkan dengan persamaan berikut (Mankiw, 2003):

$$Y = C(Y - T) + I(r^*) + G + NX(e)$$

Persamaan ini menyatakan bahwa permintaan agregat  $Y$  adalah jumlah konsumsi  $C$ , investasi  $I$ , belanja pemerintah  $G$ , dan ekspor neto  $NX$ . Konsumsi bergantung secara positif pada *disposable income*  $Y - T$ . Investasi berhubungan secara negatif dengan tingkat bunga dunia  $r^*$ . Ekspor neto berhubungan secara negatif dengan kurs  $e$ .

#### Penerimaan Pemerintah

Penerimaan pemerintah umumnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Dana Perimbangan yang terdiri dari bagi

hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pendapatan lain-lain yang sah yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan lain-lain pendapatan serta penerimaan pembiayaan yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran, penjualan asset daerah yang dipisahkan, penjualan investasi lainnya, pinjaman luar negeri, pinjaman dari Pemerintah Pusat, pinjaman dari Daerah Otonom lainnya, pinjaman dari BUMN dan BUMD, pinjaman dari Bank dan Lembaga Keuangan dan pinjaman dalam negeri lainnya.

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa pajak dan retribusi merupakan sumber utama dari penerimaan pemerintah. Menurut Ani Sri Wahyuni, pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang yang ada tanpa harus memberikan imbalan langsung. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu Direktorat Jenderal di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang tiap cabangnya ada di setiap provinsi termasuk provinsi Maluku. Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (regulasi tertentu) kepada masyarakat dengan memberikan jasa secara langsung. Sifat pungutan tersebut dikaitkan dengan pemberian layanan tertentu yang diberikan pemerintah (pusat/daerah) sebagai imbalan langsung kepada masyarakat yang bersangkutan

Menurut Purnama (2006), pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan penerimaan dari pajak dan menambah lapangan kerja. Pertumbuhan industri di sektor riil akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak (PPn dan PPh) serta memberikan lapangan kerja dan penghematan devisa.

#### Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Konsumsi, Investasi, Pendapatan Asli Daerah

Fungsi konsumsi adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam perekonomian. Berdasarkan teori konsumsi menurut Keynes yang terkenal dengan Hipotesis Pendapatan Absolut (*Absolute Income Hypothesis*) pada intinya menjelaskan bahwa konsumsi seseorang dan atau masyarakat secara absolut ditentukan oleh tingkat pendapatan, kalau ada faktor lain yang juga menentukan, maka menurut Keynes semuanya tidak terlalu berpengaruh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seiring dengan pertambahan pendapatan maka konsumsi juga akan semakin bertambah sehingga

dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Investasi dalam peralatan modal atau pembentukan modal tidak saja dapat meningkatkan faktor produksi atau pertumbuhan ekonomi, namun juga dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat.

#### Penelitian Terdahulu

Menurut hasil studi Arni (1999), melakukan studi analisa dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan internal makro ekonomi Indonesia. Dari hasil analisa disimpulkan bahwa, kebijakan peningkatan pajak pendapatan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan PDB tetapi menurunkan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil analisa ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan yaitu bahwa kebijakan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan pajak pendapatan sangat berarti dalam perbaikan ekonomi Indonesia.

Menurut hasil studi Aschauer (2000), beban pajak sehubungan dengan pengakumulasian modal publik dapat memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh negatif tersebut misalnya melalui pajak yang secara berlebihan dibebankan kepada sektor swasta sehingga pada akhirnya akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2001) untuk mengetahui peranan sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia menurunkan sebuah persamaan yang mana tingkat pertumbuhan PDRB dapat dipecah dalam kontribusi tenaga kerja, investasi swasta dan pengeluaran pembangunan serta pengeluaran rutin, juga penerimaan dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak dalam istilah produktivitas dan sumbangannya terhadap PDRB.

Dari hasil estimasi menghasilkan kesimpulan bahwa penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak adalah signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional sedangkan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan adalah signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Berdasarkan penelitian Ida Nur'ani (2011) mengenai dampak kebijakan fiskal pada masa desentralisasi fiskal di Provinsi Jawa Tengah maka disimpulkan bahwa kemandirian pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih sangat rendah dikarenakan penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak masih sangat rendah sehingga pengeluaran daerah masih di dominasi belanja langsung untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah bukan belanja tak langsung yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil studi I Gede Dwi Purnama dan I Made Adigorim (2011) mengenai pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung maka disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang berwujud belanja langsung dan tak langsung memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang memiliki APBD dan PDRB terbesar di Provinsi Bali. Belanja tidak langsung perlu ditingkatkan karena pembangunan masih perlu ditingkatkan meskipun dalam penyusunan anggaran perlu dilakukan efisiensi dan penghematan untuk meningkatkan tabungan pemerintah yang diperlukan untuk membiayai pembangunan secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat.

#### Hipotesis

1. Diduga bahwa investasi pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.
2. Diduga bahwa konsumsi pemerintah berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku
3. Diduga bahwa Pajak berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku
4. Diduga bahwa Retribusi berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian tentang kebijakan pemerintah Provinsi Maluku khususnya aspek pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 yang diproyeksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten / kota se-Provinsi Maluku.

#### Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dapat diperoleh dari berbagai instansi yang terkait yaitu Badan Pengelola Keuangan Provinsi Maluku, BPS Provinsi Maluku dan sumber-sumber lainnya yaitu jurnal-jurnal dan hasil penelitian.

Data yang dibutuhkan untuk menjadi bahan penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten / kota se-Provinsi Maluku.

#### Metode Analisis Data



Untuk mengidentifikasi dampak pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku maka dilakukan analisis dengan menggunakan metode regresi linier dengan jenis data panel. Sebagai variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dari 11 kabupaten / kota diproxy dengan PDRB sedangkan variabel bebasnya (*independent variable*) adalah pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah. Dalam penelitian ini akan dilihat seberapa besar dampak pengeluaran pemerintah dan penerimaan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.

$$PDRB = f(\text{Pengeluaran Pemerintah, Penerimaan Pemerintah})$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku (Rp.)

X1 = Investasi Pemerintah (Rp.)

X2 = Konsumsi Pemerintah (Rp.)

X3 = Pendapatan Asli Daerah (Rp.)

Metode Regresi Data Panel akan memberikan hasil pendugaan yang *bersifat Best Linear Unbiased Estimation (BLUE)* jika semua asumsi *Gauss Markov* terpenuhi diantaranya adalah non-autocorrelation.

*Non autocorrelation* inilah yang sulit terpenuhi pada saat kita melakukan analisis pada data panel. Sehingga pendugaan parameter tidak lagi bersifat BLUE. Jika data panel dianalisis dengan pendekatan model-model *time series* seperti fungsi *transfer*, maka ada informasi keragaman dari unit *cross section* yang diabaikan dalam pemodelan. Salah satu keuntungan dari analisis regresi data panel adalah mempertimbangkan keragaman yang terjadi dalam unit *cross section*.

Keuntungan melakukan regresi data panel, antara lain:

- Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan estimasi ekonometrik yang efisien.
- Panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan oleh *data cross section* atau *time series* saja.
- Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Tidak seperti regresi biasanya, regresi data panel harus melalui tahapan penentuan model estimasi yang tepat.

#### Penentuan Model Estimasi

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

- 1. Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)**  
Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karenanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

- 2. Fixed Effect Model (FE)**

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepsinya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering disebut juga dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*.

- 3. Random Effect Model (RE)**

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh error teras masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

Untuk memilih model yang paling tepat terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan, antara lain:

- 1. Uji Chow**

*Chow test* adalah pengujian untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Apabila hasil :

H 0 maka pilih *Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)*

H 1 maka pilih *Fixed Effect Model (FE)*

- 2. Uji Hausman**

*Hausman test* adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan.

Apabila hasil :

H 0 maka pilih *Random Effect Model (RE)*

H 1 maka pilih *Fixed Effect Model (FE)*

### Definisi Operasional Variabel

Untuk memudahkan pemahaman terhadap istilah dari variabel yang digunakan pada penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan perihal batasan operasional sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat perkembangan ekonomi di 11 kabupaten / kota di Provinsi Maluku diproyeksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar konstan dan diukur dalam Rupiah.
- Pengeluaran pemerintah yaitu sejumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai pelayanan publik (konsumsi) dan pengeluaran pembangunan (investasi) dan diukur dalam Rupiah.
- Penerimaan pemerintah yaitu sejumlah dana yang diperoleh pemerintah sebagai pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak dan retribusi dan diukur dalam Rupiah.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Hausman

Dari hasil uji Hausman ini, diperoleh nilai Chi-squarenya seperti pada Tabel 4.12 dibawah ini:

**Tabel 2.** Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: GE			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

Sumber: data diolah

Berdasarkan uji Hausman diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk model terbaik dalam penelitian ini adalah *fixed effects model* (FEM).

### Fixed Effects Model (FEM)

Sebagaimana analisis sebelumnya, dari uji Hausman menghasilkan suatu model terbaik dalam penelitian ini yakni *fixed effects model* (FEM). Model model regresi *Fixed effect* (efek tetap) digunakan pada kondisi tiap objek yang saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan kondisi objek tersebut pada waktu yang lain.

Model ini dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Efek tetap disini maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu. (Wing, 2009).

Dengan didasarkan pada hasil pengujian, maka terbentuklah model operasional dalam penelitian ini, yaitu:

$$GE_{\text{Maluku},2008-2014} = \beta_0 + \beta_1 INV_{11\text{kota/kab},2008-2014} + \beta_2 KONS_{11\text{kota/kab},2008-2014} + \beta_3 \text{Pendapatan Asli Daerah}_{11\text{kota/kab},2008-2014} + e_{11\text{kota/kab},2008-2014}$$

### Deskripsi Statistik Variabel

Untuk memperoleh Gambaran secara menyeluruh tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini baik variabel terikat maupun variabel bebas, maka dilakukan terlebih dahulu analisis secara statistik deskriptif yang mencakup nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan nilai ekstrim (nilai maksimum dan minimum). Berikut ini rangkuman data statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.** Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	GE?	INV?	KONS?	PAD?
Mean	2.259579	142.0636	212.0254	72.13918
Median	2.049000	118.3550	176.2600	4.881000
Maximum	5.578000	470.9740	665.2560	969.8980
Minimum	1.333000	13.56700	37.03800	1.084000
Std. Dev.	1.024824	86.38885	148.0861	208.7450
Skewness	2.131604	1.595665	1.292650	3.384191
Kurtosis	6.860553	5.992605	4.003064	13.38957
Jarque-Bera	104.7496	60.61087	24.35140	486.8881
Probability	0.000000	0.000000	0.000005	0.000000
Sum	171.7280	10796.83	16113.93	5482.578
Sum Sq. Dev.	78.76984	559727.6	1644711.	3268084.
Observations	76	76	76	76
Cross sections	11	11	11	11

Sumber: data diolah

Dari hasil statistik deskriptif memperlihatkan bahwa GE, INV, KONS, PENDAPATAN ASLI DAERAH yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata hitung (*mean*) bernilai positif untuk wilayah Maluku.

Investasi pemerintah sebesar 142.0636 Milyar per tahun, menunjukkan rata-rata jumlah investasi pada 11 kabupaten/kota selama kurun waktu 2007-2013.

Konsumsi pemerintah sebesar 212.0254 milyar rupiah per tahun, menunjukkan rata-rata konsumsi yang didapat oleh pemerintah daerah selama kurun waktu 2007-2013.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 72.13918 milyar rupiah per tahun, ini menunjukkan rata-rata pajak pada 11 kabupaten/kota di propinsi Maluku selama kurun waktu 2007-2013.

Sementara itu untuk sebaran data yang ditunjukkan oleh nilai maksimum dan minimum menunjukan sebaran yang luas dimana nilai maksimum tertinggi terjadi pada variabel pajak sebesar 998.8760 ribu rupiah per tahun dan nilai maksimum terendah pada variabel GE dengan angka pertumbuhan sebesar 5.578.000 per tahun. Sedangkan untuk nilai minimum

tertinggi terjadi pada variabel konsumsi yaitu sebesar 3.703.800 rupiah per tahun dan nilai minimum terendah pada variabel retribusi yakni sebesar 0.000000 rupiah per tahun (untuk menunjukan nilai maksimum dan minimum dari masing-masing data yang diteliti).

Untuk standar deviasi terlihat nilai positif untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk nilai standar deviasi tertinggi dari semua variabel yang diteliti adalah variabel Pajak dengan nilai sebesar 3.278.555 rupiah per tahun dan nilai standar deviasi terendah berada pada variabel GE dengan nilai sebesar 1.024824 persen per tahun.

#### Hasil Estimasi Menggunakan Pendekatan Data Panel

Berdasarkan hasil estimasi pengaruh investasi, konsumsi, PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi Maluku, dengan menggunakan program *eviews 6* terlihat hasil seperti dibawah ini yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

**Tabel 4.** Hasil Estimasi Pengaruh Kebijakan Fiskal (Investasi, Konsumsi dan PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Maluku

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.079148	0.018520	112.2671	0.0000
INV?	0.000456	8.40E-05	5.425750	0.0000
KONS?	0.000625	6.08E-05	10.27899	0.0000
PAD?	4.91E-06	1.87E-05	0.262470	0.7940
Fixed Effects (Cross)				
R-squared	0.984039	Mean dependent var		3.570179
Adjusted R-squared	0.980049	S.D. dependent var		1.909818
S.E. of regression	0.128204	Sum squared resid		0.854684
F-statistic	246.6158	Durbin-Watson stat		1.189049
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah

Hasil estimasi yang ditunjukkan oleh tabel 4, menunjukkan bahwa memiliki model yang baik, ini diperlihatkan oleh angka Adjusted R-Squared sebesar 0.98 %. ini menandakan bahwa model yang dibangun sesuai dengan teori dan fakta ilmiah. Sehingga memiliki tingkat akurasi dan kepercayaan yang tinggi.

#### Pengaruh Investasi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku

Hasil estimasi pada tabel 4, terlihat dengan jelas bahwa variabel investasi pemerintah (INV) yang merupakan unsur pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini, memiliki hubungan yang positif yang ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar 0.000456 dan berpengaruh signifikan dengan ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.0000, terhadap

pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku, dengan demikian hipotesis terbukti.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Dwi Purnama dan I Made Adigorim (2011) mengenai pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung maka disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang berwujud belanja langsung dan tak langsung memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ini menunjukkan bahwa variabel investasi pemerintah (INV) memiliki hubungan dan pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku. Dengan demikian setiap peningkatan atau penurunan investasi akan memberikan efek atau dampak

terhadap pertumbuhan Ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah Maluku harus bisa mendorong supaya terjadi peningkatan investasi di Maluku. Dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah dalam hal belanja modal atau belanja infrastruktur.

#### **Pengaruh Konsumsi Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku**

Hasil estimasi pada tabel 4, terlihat dengan jelas bahwa variabel konsumsi pemerintah (KONS) yang merupakan unsur pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif yang ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar 0.000625 dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.0000, terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku, dengan demikian hipotesis terbukti.

Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Dwi Purnama dan I Made Adigorim (2011) mengenai pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung maka disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah yang berwujud belanja langsung dan tak langsung memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Ini menunjukkan bahwa variabel konsumsi pemerintah (KONS) memiliki hubungan dan pengaruh yang sangat kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku. Artinya disini bahwa konsumsi pemerintah dalam bentuk belanja rutin dan operasional seperti pembayaran gaji pegawai, sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Maluku, karena konsumsi pemerintah akan mendorong terjadinya permintaan. Konsumsi pemerintah daerah juga akan mendorong daya beli masyarakat Maluku.

#### **Pengaruh PAD Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku**

Hasil estimasi pada tabel 4, terlihat dengan jelas bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan unsur pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif yang ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar 0.000625 dan berpengaruh sangat signifikan dengan ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.7940, terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku, dengan demikian hipotesis tidak terbukti.

Hasil temuan ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil tersebut, ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah di propinsi Maluku dapat memiliki hubungan yang positif namun tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku. Artinya bahwa, Pendapatan asli daerah di Maluku, belum dimaksimalkan secara baik dan terencana dalam pemanfaatannya untuk menstimulan atau mendorong perekonomian Maluku. Selain itu Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) di Maluku belum memberikan efek multiplier yang kuat, ini terlihat dengan tidak ada pengaruhnyaterhadap pertumbuhan ekonomi Maluku. Untuk itu pemerintah Maluku harus mampu memanfaatkan penerimaan daerah ini untuk melakukan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara baik.

#### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku**

Pada Provinsi Maluku, kebijakan fiskal dalam hal ini pengeluaran pemerintah yaitu investasi daerah dan konsumsi pemerintah, hasil estimasinya yang dilakukan secara parsial,menunjukkan bahwa (tabel 5).

**Tabel 5.** Hasil Estimasi Pengeluaran Pemerintah Daerah ( Investasi dan Konsumsi) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.043462	0.030082	67.92943	0.0000
INV?	0.000567	0.000170	3.344013	0.0015
KONS?	0.000714	6.03E-05	11.85132	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
R-squared	0.986367	Mean dependent var		2.283970
Adjusted R-squared	0.983280	S.D. dependent var		1.011910
S.E. of regression	0.130846	Akaike info criterion		-1.055017
Sum squared resid	0.907394	Schwarz criterion		-0.623721
Log likelihood	47.81556	Hannan-Quinn criter.		-0.884592
F-statistic	319.5467	Durbin-Watson stat		1.138285
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data diolah

Dengan nilai *adjusted R-Square* sebesar 0.986 memperlihatkan bahwa model yang dibangun baik dan hanya kurang 2 % yang dipengaruhi oleh faktor diluar model. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah yang diukur dari *Investasi pemerintah* memiliki hubungan yang positif yang ditunjukkan dengan angka koefisiennya sebesar 0.000567 dan memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0.0015, terhadap pertumbuhan ekonomi diprovinsi Maluku. Kemudian variabel *konsumsi pemerintah* jugamemiliki hubungan yang positif yang ditunjukkan dengan angka koefisiennya sebesar 0.000714 dan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0.0000, terhadap pertumbuhan ekonomi diprovinsi Maluku sehingga hipotesis terbukti.

Berdasarkan hasil estimasi tersebut maka, terlihat dengan jelas bahwa pengeluaran pemerintah yang

didorong oleh investasi dan konsumsi, memiliki hubungan dan pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku.

Oleh sebab itu maka pemerintah provinsi Maluku perlu melakukan peningkatan investasi khususnya pembangunan infrastruktur karena dalam jangka pendek akan menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Demikian juga dengan konsumsi pemerintah daerah, akan meningkatkan permintaan domestik yang pada akhirnya akan mendorong terjadi pertumbuhan ekonomi.

### Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku

Pada provinsi Maluku, kebijakan fiskal dalam hal ini penerimaan pemerintah yaitu *pendapatan asli daerah*, hasil estimasinya yang dilakukan secara parsial, menunjukkan bahwa (lihat tabel 6).

**Tabel 6.** Hasil Estimasi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.262064	0.019008	119.0088	0.0000
PAD?	4.05E-05	2.82E-05	-1.435477	0.1559
Fixed Effects (Cross)				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.977998	Mean dependent var	2.857276	
Adjusted R-squared	0.974275	S.D. dependent var	1.307062	
S.E. of regression	0.149208	Sum squared resid	1.447097	
F-statistic	262.6670	Durbin-Watson stat	0.871308	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data diolah

PAD memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku, ini ditunjukkan dengan nilai koefisiennya sebesar 4.05E-05. tetapi hasil estimasinya juga menunjukan bahwa pengaruh PAD tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi Maluku, ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0.1559. Hipotesis tidak terbukti.

Hal memperlihatkan bahwa PAD di Maluku memiliki potensi untuk dikembangkan, artinya bahwa PAD jika di kelola dengan baik dan benar akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku. Namun berdasarkan hasil estimasi menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah belum memberikan pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Maluku dalam meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD ) dan mengelolanya

untuk kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi belumlah termanfaatkan secara baik dan maksimal.

## V. PENUTUP

### a.) Kesimpulan

1. Investasi pemerintah yang merupakan unsur pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini, memiliki hubungan yang positif yang ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar 0.000641 dan berpengaruh signifikan dengan ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.0012 terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku, dengan demikian hipotesis terbukti.
2. Konsumsipemerintah yang merupakan unsur pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang positif yang ditunjukan dengan angka koefisien sebesar 0.000785 dan berpengaruh sangat signifikan dengan ditunjukkan oleh nilai

probabilitas sebesar 0.000 terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku, dengan demikian hipotesis terbukti.

3. Pajak yang merupakan unsur penerimaan pemerintah dalam penelitian ini, memiliki hubungan yang positif yang ditunjukkan dengan angka koefisien sebesar  $9.22E-05$  dan berpengaruh signifikan dengan ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.0495, terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku dengan demikian hipotesis terbukti.
4. Retribusi memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku. ini ditunjukkan dengan nilai koefisiennya sebesar  $5.01E-06$  tetapi hasil estimasinya juga menunjukkan bahwa pengaruh retribusi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Maluku, ditunjukkan dengan nilai probabilitasnya sebesar 0.9470. dengan demikian hipotesis tidak terbukti.

#### b.) Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Investasi pemerintah harus ditingkatkan untuk belanja infrastruktur sehingga terciptanya serapan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Konsumsi pemerintah perlu dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di pasaran agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.
3. Pajak perlu adanya penentuan sumber-sumber pajak baru sehingga dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
4. Retribusi perlu dikelola secara maksimal dengan cara sinergitas antara tiap-tiap dinas yang mengelola retribusi sehingga pemanfaatan retribusi untuk membiayai investasi pemerintah.

#### REFERENSI

- Afdal**, 2005. *Analisis Kemampuan Fiskal Daerah dan Kebijakan Dalam Menghadapi Sumber Pendapatan Daerah Tanpa DBH Minyak Bumi di Kabupaten Kampar*, Thesis. ITB Central Library, Ganesha Digital Library.
- Arni, Enggia**, 1999. *Analisa Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Keseimbangan Internal Ekonomi Makro Indonesia*. Thesis. ITB Central Library, Ganesha Digital Library.
- Aschauer, D.A**, 2000. *Public Capital and Economic Growth: Issues of Quantity, Finance, and*

*Efficiency*. Economic Development and Cultural Change 48 (2): 391-406.

- Brata, A.G. dan Z. Arifin**, 2003. *Alokasi Investasi Sektor Publik dan Pengaruhnya Terhadap Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia*. Media Ekonomi 13 (20): 59-71.
- Brata, Aloysius Gunadi**, 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Perkembangan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar**, 2004. *Ekonometrika Dasar*, Erlangga, Jakarta.
- Gulo, Angandroa**, 2008. *Analisis Pengaruh Aspek Fiskal dan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. USU e-Repository.
- Kuncoro, M.**, 1995. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan*. Prisma 4:3-17.
- Muhammad, Marie**, 2007. *Kebijakan Fiskal Di Masa Krisis 1997*, Economics, Fiscal Policy.
- Nur'ani, Ida**, 2011. *Dampak Kebijakan Fiskal pada Masa Desentralisasi Fiskal terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Purnamaputra, I Gede Dwi, dan Adigorim, I Made**, 2011. *Pengaruh Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Samuelson, Paul A, dan Nordhaus, William D.** 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. Edisi Bahasa Indonesia. PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Seftarita, Chenny**, 2005. *Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Thesis Magister Sains, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sri Rahayu, Ani**.2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.